



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TANTANGAN BARU INDUSTRI LOGAM INDONESIA

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri logam Indonesia, khususnya yang terkait dengan aluminium, tembaga, dan bijih besi, tengah menghadapi sejumlah tantangan yang serius yang dapat berdampak besar pada daya saing dan keberlanjutan sektor ini. Salah satu isu utama yang tengah dihadapi adalah penurunan harga logam di pasar global, seperti yang terlihat pada harga aluminium dan tembaga yang terus merosot dalam beberapa hari terakhir. Harga aluminium di Bursa Logam London (LME) tercatat turun 1,21%, sedangkan tembaga turun 0,67%. Hal ini dipicu oleh ketegangan perdagangan internasional, khususnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Tiongkok, yang merupakan konsumen logam terbesar di dunia, mengalami penurunan permintaan yang cukup signifikan sebagai dampak dari kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh pemerintahan AS, terutama yang berkaitan dengan pembatasan investasi AS terhadap sektor teknologi, energi, dan sektor strategis lainnya di Tiongkok. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan harga logam dunia mengalami penurunan karena adanya ketidakpastian pasar dan menurunnya permintaan dari negara besar seperti Tiongkok.

Industri logam Indonesia juga terpengaruh oleh kebijakan tarif dan proteksionisme yang diterapkan oleh negara-negara besar, seperti AS. Sebagai contoh, tarif aluminium yang akan dikenakan kepada Kanada dan Meksiko pada Maret mendatang menambah kecemasan di kalangan produsen logam AS. Meskipun begitu, para produsen di AS tetap bersedia membayar premi tinggi agar logam tersebut tetap mengalir ke pasar mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran besar, aliran logam dunia tetap berlanjut secara normal, dengan pasar AS bernilai lebih dari USD11 miliar. Namun, dalam jangka panjang, hal ini menambah ketegangan di pasar global dan berpotensi memengaruhi daya saing Indonesia di pasar internasional.

Di sisi domestik, industri logam Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kebijakan ekspor tembaga, terutama yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kembali memberikan izin ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport dengan syarat kenaikan tarif ekspor. Kebijakan ini diambil setelah terjadinya kebakaran di *smelter* baru Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, yang menyebabkan produksi terhambat. Akibatnya, Indonesia harus menghadapi situasi dimana sebagian besar produsen tembaga di Indonesia, termasuk Freeport dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), menghentikan ekspor konsentrat tembaga, yang hanya dapat dilakukan jika telah melewati proses pengolahan di *smelter*.

Namun, kebijakan pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dengan tarif lebih tinggi ini menghadapi tantangan dari segi daya saing. Meskipun diharapkan dapat membantu mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat insiden kebakaran *smelter*, kebijakan ini dapat meningkatkan biaya bagi produsen domestik yang mengandalkan ekspor tembaga sebagai

salah satu sumber pendapatan. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, hal ini berpotensi merugikan sektor industri logam Indonesia, yang sedang berusaha untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi pasar global.

Atensi DPR

DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam memantau kebijakan yang memengaruhi industri logam Indonesia, baik yang berkaitan dengan kebijakan ekspor maupun kondisi pasar global. Komisi VII DPR RI, melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa kebijakan tarif ekspor yang diterapkan pada PT Freeport Indonesia tidak akan merugikan daya saing industri logam dalam negeri serta dapat mengurangi dampak dari ketegangan perdagangan global terhadap sektor logam Indonesia. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengolahan logam untuk memastikan kelancaran produksi dan ekspor. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong kebijakan yang lebih mendukung kestabilan industri domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor logam Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Sumber

Bisnis Indonesia, 26 Februari 2025;
idnfinancials.com, 14 Februari 2025.

Minggu ke-4 Februari
(24 Februari s.d. 2 Maret 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*